



Sulit Merealisasikan

● Sambungan Hal 1

Sehingga pihaknya kesulitan apabila harus menyiapkan subsidi, setelah menunggu rencana penerapan semipedeestrian di Malioboro akan mengurangi pendapatannya. Meski secara kemanusiaan, Pemda DIY bisa saja mengusahakan, namun demikian Made menegaskan pihaknya belum bisa mengkomodifikasi usulan tersebut.

"Karena dalam Perda nomor 5 tahun 2015 betor ini tidak terdaftar. Jadi bagaimana kami memberikan perlindungan kalau mereka ini tidak jelas kategorinya," katanya saat dihubungi *Tribun Jogja*, Minggu (1/11).

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, betor sendiri menurut Made tidak memenuhi syarat yang telah diatur. "Jadi dasar kami merekomendasikan subsidi harus dari mana. Dari sisi kelainan berdasarkan UU lalu lintas juga tidak bisa kami akomodir," tegasnya.

Made menegaskan, kepada paguyuban betor di DIY supaya mengikuti aturan yang ada, agar ketika terjadi urgensi seperti saat ini tidak merasa tersisihkan dan sulit terfasilitasi untuk keberlangsungan mata pencahariannya. Menurut Made hal ini sangat mendesak lantaran pihak dishub menemukan fakta jika kebanyakan penyedia jasa betor tersebut berasal dari luar DIY.

"Infonya kan ada 1.700 penyedia betor se-DIY. Se-

telah kami lakukan verifikasi, ternyata hanya 600 saja yang ber-KTP DIY. Ini menjadi pekerjaan bersama, sementara keberadaan betor ini kan sulit dikategorikan," terang Made.

Termasuk permintaan untuk menyediakan tempat mangkal baru, hal tersebut pun sulit direalisasikan. "Tempat baru, ya, sangat sulit. Sebetulnya kami sudah mengajak rekan-rekan penyedia betor ini untuk mencari peluang lain. Karena kami sulit mengakomodir hak mereka, kalau mereka tidak termasuk yang dilindungi pemerintah," ujarnya.

Terkait rencana semipedeestrian kawasan Malioboro, sebetulnya hal itu sudah disosialisasikan sejak lama. Bahkan dalam aturan terdahulu juga kawasan Malioboro harus bebas dari kendaraan bermotor. "Saya malah setuju betor tetap ada, namun dijadikan sebagai moda transportasi barang di pedesaan. Mungkin ke depan harus mulai merencanakan itu," ungkapnya.

Tetap berjalan

Sementara untuk kesiapan uji coba penerapan semipedeestrian kawasan Malioboro, Made menuturkan, kawasan Malioboro saat ini sedang diajukan sebagai bagian dari *World Heritage* ke Unesco.

"Penataan transportasi menjadi salah satu poin penting, di mana kondisi sekarang kita semua tahu bahwa Malioboro adalah pusat ekonomi di Kota Yogyakarta crowded, macet, sehingga perlu adanya penanganan rekayasa dan manajemen lalu lintas. Tujuannya agar benar-

benar Malioboro bisa mendukung fungsi-fungsi yang diharapkan dalam rangka menuju *World Heritage* tersebut. Jadi, kami harapkan dukungan semua masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap uji coba ini," jelas Made.

Ia menambahkan bahwa saat uji coba semipedeestrian selama dua pekan mendatang, pemberlakuan rekayasa lalu lintas dilakukan dengan skema giratori atau bundaran dengan arus berlawanan arah jarum jam. "Akan berlaku satu arah, khusus di sekitar Kawasan Malioboro, yakni Jalan Mayor Suryotomo, Jalan Mataram, Jalan Abu Bakar Ali, Jalan Pembela Tanah Air, dan Jalan Letjen Suprpto," tutur Made.

Jam pelaksanaan

Sementara untuk Jalan Malioboro, pihaknya hanya memperkenankan kendaraan tidak bermotor yang boleh melintas, kecuali bus Trans Jogja, kendaraan kepolisian, kendaraan layanan kesehatan, pemadam kebakaran, dan kendaraan patroli.

"Harapannya memang ini akan mendukung penataan secara tertib transportasi yang memang menjadi bagian dari rekomendasi, dari dossier tim kebudayaan untuk mendukung kawasan (sumbu) filosofis ini," imbuhnya.

Khusus pada pelaksanaan perdana Selasa besok, rekayasa lalu lintas di Jalan Malioboro tersebut akan mulai diterapkan pukul 11.00 WIB hingga pukul 22.00 malam. Sementara hari berikutnya yakni tanggal 4 hing-

ga 15 November 2020 jam pemberlakuan semipedeestrian akan dimulai pukul 06.00 sampai 22.00 WIB. "Seandainya pemberlakuan satu arah untuk jalan selain Malioboro akan kami berlakukan 24 jam," urainya.

Oleh karenanya, ia mengimbau kepada masyarakat agar persiapan barang untuk aktivitas ekonomi yang ada di kawasan Malioboro dapat dilakukan setelah pukul 22.00 WIB, sampai dengan sebelum pukul 06.00.

"Kami ingin tetap membantu semua aktivitas yang nantinya berjalan termasuk membantu PKL yang ada di sana, karena akan banyak wisatawan yang datang menikmati. Semoga ini dapat juga menumbuhkan perekonomian" tuturnya.

Saat ditanya terkait ketersediaan kantong parkir, Made menegaskan jika hal itu tetap diupayakan. Namun menurut dia, perlu diketahui oleh masyarakat bahwa seberapa banyak upaya menyediakan kantong parkir, hal itu menurut dia tidak akan mencukupi kebutuhan. "Sebenarnya sudah ada kantong parkir yang sudah disediakan baik itu yang ada di Abu Bakar Ali, kemudian Ngabean, di Pasar Sore dekat Beringharjo, lalu di Ramai Mal," kata dia.

"Kalau mungkin dilihat dari sisi jumlah, tidak bisa memenuhi seluruh kapasitas yang diinginkan oleh masyarakat. Harapan kami kemudian adalah pemanfaatan angkutan umum, tidak hanya untuk warga Jogja saja tetapi untuk wisatawan," tutup Made. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 30 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005